



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 16 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/01/2012, tertanggal 3 Januari 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 tahun 4 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Arby Saputra bin Busman, umur 9 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah mencoba menghubungi handpone Termohon tetapi tidak aktif

6. Bahwa setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon kembali datang menemui Pemohon dan rukun kembali, setelah Pemohon dan Termohon rukun kembali, Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon lagi sehingga membuat Pemohon marah;

7. Bahwa setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang lagi menemui Pemohon dengan maksud ingin kembali lagi bersama Pemohon, dan setelah bersama Pemohon, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi mencari pekerjaan tetapi Pemohon tidak memberikan izin kepada Termohon namun Termohon marah dan memaksa untuk pergi;

8. Bahwa setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon kembali lagi kepada Pemohon tepatnya pada bulan Desember 2017, dan Termohon menyapaikan maksud ingin pisah dan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kejadian tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan;

10. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan;

11. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah diajukan perubahan gugatan mengenai Identitas Termohon, namun isinya yang lain tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/01/2012, tertanggal 3 Januari 2012, **yang diterbitkan oleh** Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di Jalan Poros Pinrang, Dusun Sarampu, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

☐ bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 tahun 4 bulan;

☐ bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

☐ bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;



2 bahwa setelah 3 bulan kepergian Termohon , Termohon kembali lagi dan hidup rukun kembali dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi lagi dan membuat Pemohon marah;

2 Bahwa setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang kembali dengan maksud ingin kembali kepada Pemohon, dan kemudian meminta izin untuk pergi mencari kerja, tetapi Pemohon tidak memberikan izin dan membuat Termohon marah dan memaksa untuk pergi;

2 bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan;

2 bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan;

2. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sarampu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

2 bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

2 bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 tahun 4 bulan;

2 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

2 bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;



2 bahwa setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon kembali lagi dan hidup rukun kembali dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi lagi dan membuat Pemohon marah;

2 Bahwa setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang kembali dengan maksud ingin kembali kepada Pemohon, dan kemudian meminta izin untuk pergi mencari kerja, tetapi Pemohon tidak memberikan izin dan membuat Termohon marah dan memaksa untuk pergi;

2 bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan;

2 bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 2 Januari 2012 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, namun pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon kembali lagi dan hidup rukun kembali dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi lagi dan membuat Pemohon marah, setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang kembali dengan maksud ingin kembali kepada Pemohon, dan kemudian meminta izin untuk pergi mencari kerja, tetapi Pemohon tidak memberikan izin dan membuat Termohon marah dan memaksa untuk pergi. Pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan. Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak dating menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon kembali lagi dan hidup rukun kembali dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi lagi dan membuat Pemohon marah, setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang kembali dengan maksud ingin kembali kepada Pemohon, dan kemudian meminta izin untuk pergi mencari kerja, tetapi Pemohon tidak memberikan izin dan membuat Termohon marah dan memaksa untuk pergi. Pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2 bulan. Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon kembali lagi dan hidup rukun kembali dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi lagi dan membuat Pemohon marah, setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang kembali dengan maksud ingin kembali kepada Pemohon, dan kemudian meminta izin untuk pergi mencari kerja, tetapi Pemohon tidak memberikan izin dan membuat Termohon marah dan memaksa untuk pergi. Pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan. Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl



xxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 tahun 4 bulan;

2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, pada bulan maret 2015, mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon,
4. bahwa setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon kembali lagi dan hidup rukun kembali dengan Pemohon, setelah itu Termohon pergi lagi dan membuat Pemohon marah, setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon datang kembali dengan maksud ingin kembali kepada Pemohon, dan kemudian meminta izin untuk pergi mencari kerja, tetapi Pemohon tidak memberikan izin dan membuat Termohon marah dan memaksa untuk pergi;
5. bahwa pada bulan Desember 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan;
6. bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
2. bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
3. bahwa tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon setelah Termohon meninggalkan tempat



kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan menjadi fakta bahwa Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimanadimaksuddalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwafaktahukumtersebuttelah juga memenuhiPasal19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaj'l terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd, Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sarinah S. S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 483/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawan Jamal, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Sarinah S. S.H

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp480.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp160.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)	